



# Kejati Lamban Tangani Kasus

**PONTIANAK, SP** – Penyelesaian sejumlah kasus korupsi di Kalbar terganjal. Sebut saja dugaan korupsi di Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII dan kasus korupsi dana hibah KONI Kalbar 2006-2008 yang menyeret anggota DPR RI asal Kal-

bar, Zulfadhli. Walau beda tahapan, penyelesaiannya masih mengambang.

Kasus pertama, dugaan korupsi di PTPN XIII terkendala belum keluarnya penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Sebagaimana diketahui, dugaan kerugian negara di atas

Rp1 miliar, harus melalui audit lembaga tersebut. Diperkirakan, butuh 6-7 bulan ke depan untuk dapat hasilnya.

“Mengenai PTPN itu sekarang kita tangani, saya janji satu bulan ini saya selesaikan,” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat, Baginda

• **Baca Halaman 7**



**Baginda Polin Lumban Gaol**  
Kejati Kalbar

**Mengenai PTPN itu sekarang kita tangani, saya janji satu bulan ini saya selesaikan.**

“Tapi kan tidak bisa karena ini sangat tergantung pada pihak lain yaitu BPK. Namun kasus ini akan terus berjalan,” yakinnya.

Sementara terkait korupsi dana hibah KONI Kalbar 2006-2008 yang menyeret anggota DPR RI asal Kalbar, Zulfadhli, juga terganjal pusat. Mantan legislator asal Golkar ini, seharusnya sudah ditahan berdasarkan putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018. Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman terhadap Zulfadhli dengan 8 tahun penjara, denda Rp200 juta dan membayar uang pengganti Rp11,225 miliar.

“Salinan putusan Mahkamah Agung belum diterima, kalau nanti ada putusan lengkap ini, pasti segera kita tindaklanjuti,” ujarnya.

Hanya dia menjelaskan, BPK pasti berhati-hati agar tak ada yang terzalimi.

“Kenapa soal kerugian negara ini perlu valid, supaya nanti tuntutan kita pastikan bagaimana menyita barang dan segala macam,” katanya.

Baginda enggan menyebut berapa jumlah tersangka, namun dia berujar, kemungkinan ada tersangka lain. Hingga kini belum ada yang ditahan. Pasalnya ada keraguan bidang Pidana Khusus (Pidsus). Hanya bila Januari 2019, Perkiraan Kerugian Negara (PKN) sudah keluar, penahanan bisa dilakukan.

## Hal 1 | ■ kejati lamban

Polin Lumban Gaol, di Gedung Kejati Kalbar, Senin (10/12).

Waktu tunggu yang lama akan membuat para tersangka bebas berkeliaran. Padahal jika cepat diselesaikan, mereka akan merasakan hukuman. Dia pun mewanti-wanti, bisa saja Kejati siap dengan unsur dakwaan, tapi perhitungan kerugian negaranya terlambat keluar.

“Kita sudah penyelidikan, namun masih menunggu hasil dari BPK,” sebutnya.



Dia mengatakan, sudah dua kali berkirim surat ke MA. Akan tetapi salinan putusan tak kunjung diberikan. "Kita juga tidak mungkin mengintervensi. Tanya pengadilan saja," serunya.

Akademisi Universitas Tanjungpura, Erdi menilai kinerja penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi masih lamban. Penilaian ini dia sampaikan terkait kasus korupsi PTPN XIII.

"Penanganannya lama sekali, kasus ini terkesan sengaja dibiarkan. Orang yang sudah ditetapkan tersangka, tapi masih dibiarkan," kata pengajar yang mengirimkan surat untuk Presiden Jokowi, terkait korupsi di PTPN XIII ini.

Dia meminta agar penanganan kasus korupsi menyeluruh, tidak pandang besar dan kecil, seperti yang selama ini terlihat. Kasus korupsi yang nilainya kecil ditangani, sedangkan kasus korupsi besar dibiarkan. "Jangan hanya mengusut (kasus) yang kecil, tapi kasus yang besar dibiarkan," pintanya.

Komitmen penegak hukum dalam pemberantasan korupsi juga menurun, dengan banyaknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan jaksa dan hakim. "Jadi wajar saja kalau saya merasa tidak percaya dengan penegakan hukum sekarang ini," katanya.



### 13 Kasus

Kejati Kalbar menyebut sepanjang 2018, pihaknya sudah menangani 13 kasus tindak pidana korupsi. Beberapa di antaranya, sudah masuk tahap penyidikan. Dia mengklaim sudah berhasil menyelamatkan kerugian tanah yang jika diuangkan senilai Rp3,5 miliar dan uang sejumlah Rp1,5 miliar.

“Namun dari semuanya itu, yang penting ke depan kita terus upayakan pemberantasan korupsi ini,” tegasnya.

Kajati yang belum lama menjabat ini akan mengedepankan edukasi soal bahaya korupsi. Pasalnya, semua pihak bisa terlibat dan berdampak. Sudah pasti hal ini merusak banyak hal, termasuk kesejahteraan.

Sementara Kejaksaan Negeri Pontianak, kini tengah menangani dua laporan. Pertama terkait alat peraga edukasi dan pengadaan satpam. Diperkirakan, Rp250 juta uang negara sepanjang 2018, berhasil dise-

amatkan.

Kejari Pontianak, Refli memastikan komitmen pihaknya memerangi korupsi. Terlebih saat ini Kota Pontianak dijadikan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

“Zona integritas akan kita laksanakan di Pontianak,” katanya.

Berdasarkan data Bidang Pidana Khusus Kejati Kalbar, sepanjang Januari-November 2018 sebanyak 27 laporan pengaduan masyarakat masuk dari sejumlah Kejaksaan Negeri di Kalbar. Dari 27 laporan, 15 di antaranya dalam tahap penyelidikan, diserahkan ke bidang atau intansi lain 1 laporan, dan tidak ditindaklanjuti sebanyak 11 laporan.

Bidang Intelijen, berhasil mengeksekusi empat dari 15 Daftar Pencarian Orang (DPO) yang diumumkan sejak 2016. Sebanyak 11 lainnya belum berhasil ditangkap. Alasannya, foto tidak jelas, alamat rumah tidak sesuai lagi, dan belum dapat nomor ponsel mereka. Untuk pencekal, Kejati Kalbar mencekal 3 orang, baik dalam tahap penyelidikan maupun eksekusi dalam tindak pidana korupsi.

### Kalbar Rendah

Anggota DPRD Kalbar, Lutfi merasa kasus korupsi di Kalbar lebih dibanding provinsi lain di Indonesia. Meski demikian, dia tidak menyebut angka pasti. Menurutnya, para kepala daerah dan pejabat daerah, sangat memperhatikan aturan-aturan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

“Sehingga mereka tidak tergelincir dalam permainan korupsi yang terjadi. Kalau kita bandingkan di daerah lain, ada saja yang kena OTT,” tuturnya.

Penanganan kasus korupsi di Kalbar, menurutnya cukup baik dan lancar. Rata-rata kasus tidak terlalu besar. Artinya, ketika ada kasus, langsung ditangani penegak hukum sampai pengadilan.

“Mudah-mudah di Kalbar tidak ada yang kena OTT atau terjerat kasus korupsi. Saya yakin ke depan akan bagus, apalagi Gubernurnya juga menguasai aturan ter-

kait keuangan ini,” jelasnya.

Ditanya perkara politisi yang jadi tersangka korupsi, terutama di legislatif, dia mengatakan, potensi itu ada dalam pelaksanaan APBD. Dalam pembahasan anggaran, akan ada negosiasi.

“Tapi di Kalbar tidak ada hal seperti itu,” kilahnya.

### Tergantung Pemerintah

Divisi Korupsi Politik, Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafarina mengatakan, pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak bisa dipisahkan dengan agenda pemenuhan pemerintahan ke depan. Hal itu dimulai dengan penyelenggaraan pemilihan umum legislatif dan eksekutif bebas dari korupsi.

Dalam momentum Hari Antikorupsi, ICW memberikan peringatan agar dalam Pemilu, masyarakat mende-kati dan melihat rekam jejak para kandidat. Baik di Pileg maupun Pilpres.

“Jadi mereka mulai mengenai siapa-siapa kandidat; baru mereka memilih,” katanya.

ICW kini tidak hanya menindaklanjuti kasus korupsi yang ditangani KPK, namun juga pihak kepolisian dan kejaksaan. Pelaku Tipikor kini didominasi Aparatur Sipil Negara (ASN), bukan politikus.

“Tapi yang kami lihat hingga sekarang, korupsi yang paling berbahaya adalah korupsi politik, yaitu di dalamnya ada aktor-aktor politik, baik itu kepala daerah, ataupun anggota legislatif di daerah ataupun di ranah nasional,” sebutnya.

Korupsi politik dinilai berbahaya, lantaran dalam perjalanannya bukan hanya bicara soal kerugian negara, namun juga soal regulasi dan kebijakan. Karena itu, ICW mendorong masyarakat lebih selektif dalam memilih. Agar ke depan tidak banyak lagi pejabat yang terjerat kasus korupsi.

“Jika terdapat calon yang memiliki catatan merah tentang korupsi, atau yang bersangkutan adalah mantan narapidana, atau bahkan pernah melakukan tipikor, ini yang menurut ICW tidak usah dipilih masyarakat,” sebutnya. (iat/nak/sms/bls)